

KOMUNITAS SETEMPAT DIAJAK AMBIL BAGIAN

Penataan Kotabaru Segera Dilakukan

YOGYA (KR) - Penataan di kawasan Kotabaru sebagai penyangga Malioboro akan segera dilakukan. Komunitas setempat mulai pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan lainnya diharapkan mampu berkolaborasi serta turut mengambil bagian.

Ajakan tersebut disampaikan Walikota Yogya Hasto Wardoyo, ketika menerima audiensi dari kalangan Gereja Kotabaru dalam open house di kompleks Balaikota Yogya, Rabu (7/5). "Tahap awal akan kita tata yang di bantaran Kali Code Kotabaru. Terutama yang di sisi selatan (pelaku usaha) ban-ban itu dengan membangun gazebo," ungkapnya.

Penataan itu menjadi bagian dari rencana membangun event night bazaar maupun sunday

morning di kawasan Kotabaru. Keberadaannya pun diharapkan mampu menjadi daya tarik baru bagi pengunjung. Dengan konsep tersebut diharapkan muncul peluang ekonomi menengah ke bawah dengan tetap memperhatikan tata ruang.

Hal itu selaras dengan rencana menjadikan Kotabaru sebagai serambi Malioboro dengan penataan ruang ekonomi yang selama ini tidak diperbolehkan di kawasan Malioboro. Gazebo yang



KR-Ardhi Wahdan

Walikota Yogya menerima audiensi perwakilan Gereja Kotabaru dalam open house, kemarin.

nantinya menghadap ke Kali Code pun bisa menjadi daya ungkit usaha baru di kawasan cagar budaya itu.

Hasto berharap, Gereja Kotabaru yang memiliki kegiatan sosial berupa Segu Mubeng bisa

ikut andil. Terutama bersama-sama membersihkan Kali Code yang selama ini kerap menjadi sasaran pembuangan sampah liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. "Saya melihat ada kasus yang dibuang ke

Kali Code. Rumput liar di sana juga sudah rimbun. Saya kira Segu Mubeng yang digulirkan oleh Gereja Kotabaru bisa ikut bersih-bersih Kali Code. Ke depan juga bisa kami jadikan mitra untuk program food bank dalam mendistribusikan makanan ke para lansia," ajaknya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Bidang Rumah Tangga Gereja Kotabaru, Tuning Dwi, menyambut baik arahan walikota. Menurutnya, setiap tahun terutama pada peringatan Hari Bumi, komunitasnya juga rutin melakukan aksi bersih pantai. Pihaknya pun akan mencoba mengalihkan lokasi aksi sosial itu untuk bersih-bersih Kali Code.

Terkait ajakan menjadikan Segu Mubeng salah satu mitra

dalam program food bank, Tuning bahkan turut mengapresiasi. Pasalnya selama ini Segu Mubeng rutin membagikan makanan setiap Rabu malam dan Sabtu pagi. Kegiatan itu bahkan turut melibatkan komunitas lain multikultur mulai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, mahasiswa UMY serta entitas dari agama lain.

Sedangkan menyangkut rencana event sunday morning maupun night bazaar di Kotabaru, menurutnya perlu disosialisasikan secara lebih gencar. Khususnya teknis kegiatan karena setiap Minggu pagi ada beragam kegiatan keagamaan di seputar Gereja St Antonius Padua Kotabaru, Gereja HKBP Kotabaru maupun Masjid Syuhada Kotabaru. **(Dhi)-f**

USUT DUGAAN KEBOCORAN SOAL ASPD SMP

Prihatin, Hasto Berharap Penelusuran Tuntas

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Hasto Wardoyo turut prihatin mendengar informasi dugaan kebocoran soal Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) jenjang SMP. Guna memastikan dugaan tersebut benar atau tidak, dirinya berharap penelusuran dapat dilakukan dengan tuntas.

Menurut Hasto, proses penelusuran dugaan kebocoran soal sebenarnya cukup mudah dilakukan. "Tadi saya sudah bicara dengan kepala dinas (pendidikan) supaya diteliti betul. Kan mudah telusurnya saya kira. Misalkan si pembuat soal siapa orangnya, kemudian siapa yang katakanlah diduga membocorkan. Terus apakah soalnya persis antara yang dibocorkan sama yang keluar itu juga penting, karena kalau tidak persis kan ya apa itu dianggap bocor. Hal-hal seperti itu saya minta dipelajari," urainya, Rabu (7/5).

Awal mula dugaan kebocoran soal ASPD SMP berawal dari media sosial

X. Diduga soal yang bocor tersebut ialah pada mata pelajaran Matematika. Informasi itu pun lantas viral kemudian merujuk ke SMPN 10 Yogya lantaran salah satu gurunya menjadi pembuat soal ASPD. "Kalau persis misalnya angkanya persis kalimatnya persis berarti kemungkinan bocor. Tetapi menurut saya tolong ditelusur dulu, asal muasal seperti apa," imbuh Hasto.

Jika dugaan itu terbukti dan pihak yang membocorkan juga sudah ditemukan, Hasto meminta ada proses tindak lanjut sesuai aturan perundangan. Pasalnya, tindakan kebocoran soal ujian tidak hanya menyakiti siswa dan orangtua melainkan juga citra Yogya sebagai kota pendidikan yang bakal tercoreng.

"Otomatis kalau ada soal bocor di suatu wilayah saya kira wilayah itu ikut merasa prihatin. Kami pun sebagai walikota juga prihatin kalau seandainya ada guru yang betul-betul

melakukan suatu tindakan yang di luar ketentuan," tandasnya.

Sementara itu Kepala SMPN 10 Yogya Edy Thomas Suharta, berharap masyarakat luas jangan sampai terjebak dengan pernyataan dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Terkait tuduhan dugaan kebocoran soal ASPD Matematika di sekolahnya, sedang dalam penelusuran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY. Pasalnya kewenangan pembuatan soal ASPD ada di provinsi.

Pihaknya pun memastikan seluruh jajaran civitas pendidikan memegang teguh integritas. Begitu pula salah seorang gurunya yang sempat dituduh membocorkan soal.

"Alhamdulillah tidak ada indikasi guru kami yang membocorkan. Itu bisa ditanyakan ke provinsi. Kita harus melihat secara jernih dan hati-hati agar tidak menimbulkan polemik," katanya. **(Dhi)-f**

PEMDA DIY LUNCURKAN 'JOGJA DIGDAYA'

Sistem Pelaporan Cepat, Akurat dan Terintegrasi

YOGYA (KR) - Pemda DIY meluncurkan sistem pelaporan dampak bencana berbasis digital 'Jogja Digdaya' atau Digitalisasi Pelaporan Dampak Bencana pada Satuan Pendidikan DIY, di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Rabu (7/5). Peluncuran dilakukan Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X. Inovasi tersebut digagas oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY, Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) DIY, serta Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana (Sekber SPAB) DIY.

"Sistem ini merupakan wujud komitmen Pemda DIY dalam memastikan keselamatan warga satuan pendidikan sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana yang inklusif dan berbasis data," kata Sri Paku Alam X di Kompleks Kepatihan, Rabu (7/5).

Menurutnya, Jogja Digdaya sengaja dirancang untuk menjadi sistem pelaporan cepat, akurat, dan terintegrasi yang dapat digunakan oleh sekolah dan madrasah dalam melaporkan berbagai dampak bencana atau keadaan darurat. Adapun bentuk laporan itu mencakup kondisi infrastruktur pendidikan, keterlibatan peserta didik, tenaga

pendidik, hingga gangguan terhadap proses belajar mengajar.

Selain itu Wagub juga menyoroti pentingnya penyelarasan antara data dan bantuan yang diberikan saat terjadi bencana. Tindakan itu perlu dilakukan karena selama ini sering terjadi miskomunikasi antara sekolah dan lembaga donor, sehingga bantuan yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata.

"Kami berharap dengan sistem digital yang bekerja secara real-time, sekolah dapat langsung menginput data kerusakan maupun kebutuhan, yang akan langsung terintegrasi dalam sistem informasi kebencanaan. Data ini bisa diakses oleh para pemangku kepentingan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran," terangnya.

Sedangkan Kepala Disdikpora DIY Drs Suhirman MPd menyatakan, ketangguhan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapsiagaan dan kapasitas untuk bertindak cepat dan tepat. Melalui sistem Jogja Digdaya diharapkan bisa mendorong partisipasi aktif dari sekolah, guru, murid, dan orangtua. Karena Jogja Digdaya merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan sekolah secara menyeluruh. **(Ria)-f**

MAJU DAN TERSENYUMLAH PETANI - NELAYAN INDONESIA

Fraksi Gerindra DPRD Yogya Apresiasi Penghapusan Hutang Nelayan dan Petani



Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta.

dengan bunga tinggi dari rentenir, yang seringkali memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Kelima, meningkatkan akses ke program pemerintah lainnya. Setelah terbebas dari hutang, petani dan nelayan dapat lebih mudah mengakses program bantuan lain seperti subsidi pupuk, pelatihan, dan akses permodalan yang disediakan oleh pemerintah.

Meski demikian, tidak semua hutang petani dan

nelayan akan dihapuskan. Kebijakan ini berlaku bagi hutang yang telah macet dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti dampak dari bencana alam atau pandemi. Proses seleksi dilakukan oleh lembaga keuangan terkait untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penyusunan regulasi teknis untuk pelaksanaan kebijakan ini disusun oleh kementerian terkait.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta pun menegaskan langkah dan kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil, termasuk nelayan dan petani. Kebijakan penghapusan hutang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani dan nelayan, serta mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. **(Dhi)**



07 MAY, 2025

GERINDRA KOTA YOGYAKARTA, © 2025.



KOTA YOGYAKARTA

FRAKSI Partai Gerindra DPRD Kota Yogyakarta mengapresiasi tentang penghapusan utang bagi petani dan nelayan di Indonesia. Hal tersebut kini menjadi bagian dari kebijakan resmi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5

November 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan membayar utang macet, khususnya akibat dampak pandemi atau bencana alam.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta dimotori oleh Dhian Novitasari (Ketua), Krisnadi Setyawan (Wakil Ketua), Ririk Banowati Permanasari (Sekretaris) serta Marwoto Hadi dan RM Sinarbiyat Nujanat (Anggota). Sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam Pileg 2024, Fraksi Gerindra juga menempatkan salah satu kadernya di Pimpinan DPRD yang dijabat oleh RM Sinarbiyat Nujanat sebagai Wakil

Ketua DPRD Kota Yogyakarta 2024-2029.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta memaparkan, manfaat penghapusan hutang dalam konteks kebijakan pemerintah.

Pertama, meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Dengan dihapusnya utang macet, petani dan nelayan dapat kembali fokus pada kegiatan produksi tanpa tekanan finansial, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kedua, memberikan kepastian hukum dan dukungan negara. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap sektor pertanian dan

perikanan, memberikan rasa aman bagi pelaku usaha kecil bahwa pemerintah hadir untuk mendukung mereka.

Ketiga, mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Banyak petani dan nelayan yang terdampak pandemi COVID-19 mengalami kesulitan membayar utang. Dengan penghapusan utang, mereka memiliki kesempatan untuk memulai kembali usaha mereka tanpa beban finansial yang berat.

Keempat, mengurangi ketergantungan pada rentenir. Dengan adanya penghapusan utang resmi dari pemerintah, diharapkan petani dan nelayan tidak lagi terjerat hutang